

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, dimana letak geografisnya itu pulau-pulau yang terpisah oleh lautan, ini menyebabkan pemerintahan pusat akan merasa kesulitan untuk turun tangan secara langsung. Pada saat ini tantangan kemajuan perlu dipandang dan diperhatikan secara khusus karena menantang kemajuan luar dan dalam negeri dalam hal ini perlunya otonomi daerah yang peruntukannya dimaksudkan agar memberikan keleluasaan mengatur daerahnya sendiri secara bertanggung jawab dan tetap pada tanggung jawab masing-masing daerahnya secara profesional dan teratur. Diwujudkan dengan pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional, serta perimbangan pusat dan daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2001 : 2) hal ini menyebabkan perlunya sebuah otonomi daerah agar tujuan dan peran serta pemerintah dalam melaksanakan kegiatan peningkatan dan kemajuan Negara terealisasi, maka perlunya pembentukan pemerintahan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Desa yang lebih lanjut didalamnya tertulis bahwa pemerintahan daerah mengurus urusannya sendiri yang telah diatur dalam otonomi daerah, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah serta meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam menunjang otonomi daerah sebagai pemaksimalan pelayananan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, pemerintahan pusat telah memberikan dana bantuan yang disebut *Alokasi Dana Desa* yang tentunya dialokasikan untuk kepentingan Desa. Oleh karena itu *Alokasi Dana Desa* sebagai penunjang kegiatan Desa tentunya pemerintahan Desa merasa terbantu dalam pelaksanaan teknis kegiatan Desa yang selalu disusun dalam setiap tahunnya.

Berlandaskan prinsip jika suatu bangsa ingin maju kata kuncinya adalah dengan majukan Desa, karena tidak adadaerah yang maju tanpahg Desa yang maju, dan tidak ada negara yang maju tanpa daerah yang maju (Chabib, 2010 : 28) dengan beginilah pemerintahan pusat berharap lebih dengan dikeluarkannya Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) untuk Alokasi Dana Desa yang menjadikan sumber utama pemasukan Anggaran Pembelanjaan Desa (APBdes) yang tentunya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memajukan suatu Desa. Dengan demikian pemerintahan daerah mempercayakan program-program kegiatan kepada masing-masing Desa untuk pembangunan, pemberdayaan dan sebagainya.

Pemanfaatan *Alokasi Dana Desa* Di Desa Cileunyi Wetan, masyarakat Desa tentunya harus terlibat langsung dalam pengalokasian *Alokasi Dana Desa* karena pada dasarnya *Alokasi Dana Desa* merupakan hak bagi pemerintahan Desa dan masyarakat itu sendiri, masyarakatlah yang lebih tahu, hal apa saja yang harus di utamakan untuk sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang tentunya merealisasikan visi dan misi pemerintahan daerah, hal ini perlu

dimusyawarahkan dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (MUSRENBANG) karena untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kemajuan Desa untuk membantu pemerintahan daerah untuk memajukan daerahnya. Selain melibatkan para masyarakat, juga melibatkan lembaga yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna Desa, dan juga Badan Permusyawaratan Daerah (BPD).

Pemanfaatan *Alokasi Dana Desa* ini tentunya menjadi hal yang sering diperbincangkan dalam kalangan aktifis masyarakat, karena hal ini bisa membuat sebuah perubahan kemajuan Desa dengan cepat apabila *Alokasi Dana Desa* di manfaatkan alokasi dana nya dengan tepat dan sigap, berbagai macam kegiatan yang berbau pemberdayaan masyarakat dan pembangunan diajukan oleh masyarakat dan lembaga pemerintahan Desa karena dianggap penting untuk menjadikan Desa kreatif dan mandiri tentunya program kegiatan yang dilaksanakan di Desa Cileunyi Wetan yaitu berupa pembangunan infrastruktur hal ini berkaitan dengan akses jalan masyarakat agar memudahkan untuk berkegiatan semisal petani yang tadinya harus berjalan kaki menuju tempat bercocok tanam kini sudah bias diakses memakai kendaraan bermotor ini bias mengefisienkan suatu kegiatan ekonomi. Dengan pemanfaatan *Alokasi Dana Desa* diharapkan masyarakat mampu lebih berdaya dan juga pemerintahan Desa pun ikut serta dalam mewujudkannya, karena ini merupakan suatu impian-pemerintahan daerah juga pemerintahan pusat yang mengharapkan adanya kemajuan dari setiap daerah yang itu bisa berdampak atas kemajuan negara.

Pada saat ini, Alokasi Dana Desa memang sangat digencar-gencarkan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk dijadikan sumber awal dari sebuah pendapatan Desa, hal ini berkaitan dengan kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintahan Desa Cileunyi Wetan dalam memanfaatkan Alokasi Dana Desa tersebut, dan tentunya hal ini melalui berbagai macam proses sehingga pemanfaat Alokasi Dana Desa tepat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pemenuhan pengalokasian ini berdampak kepada sektor perekonomian seperti contoh dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Cileunyi Wetan yang memprogramkan perencanaan pembangunan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri hal ini tentunya berdampak pada sector perekonomian masyarakat itu sendiri, dan tentunya menjadikan masyarakat lebih berdaya dalam kehidupan dimasyarakat itu sendiri.

Keterbatasan pemerintahan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat yang dihubungkan dengan terbatasnya kemampuan pemerintahan dalam hal anggaran, maka pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah jalan yang paling memungkinkan ( Karna, 2013 : 102), maka dari itu pemanfaatan Alokasi Dana Desa sebisa mungkin harus terserap untuk program pemberdayaan masyarakat, tentunya jika masyarakat sudah berdaya maka menghasilkan sebuah Desa yang mandiri dan kreatif, hal ini perlu adanya peran peran pemerintahan Desa dimana proses dan kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga melahirkan sebuah tingkat pemberdayaan yang diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cileunyi Wetan ?
2. Apa dampak pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Cileunyi Wetan terhadap masyarakat Desa?
3. Bagaimana proses pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Cileunyi Wetan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah yang dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan Masyarakat Desa Cileunyi Wetan.
2. Untuk mengetahui dampak pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Cileunyi Wetan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
3. Untuk mengetahui proses pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cileunyi wetan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca bahwa pemanfaatan alokasi dana Desa bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat agar tidak salah dalam penggunaannya, serta dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses pemanfaatan alokasi dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kepada aparatur Desa Cileunyi Wetan agar lebih optimal dalam memanfaatkan sumber alokasi dana Desa dan lebih baik menjalankan program pemberdayaan masyarakat, serta diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk memberikan masukan dalam melakukan proses pemanfaatan alokasi dana Desa dan menjadi bahan pertimbangan untuk aparatur Desa untuk melaksanakan program pemberdayaan sesuai dengan yang telah diprogramkan.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk mengetahui keaslian Skripsi ini, perlu dilakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian sebelumnya atau jurnal-jurnal hasil dari penelitian dan seminar. Beberapa penelitian tersebut diantaranya:

1. Sulaiman (2013) dalam Tesis ini menganalisis tentang “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Didalamnya menjelaskan tentang proses pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nanga Jetak belum didasarkan atas identitasnya sebagai Desa yang secara otonomi

memiliki kepastian keuangan untuk pembiayaan pembangunan, indikasi dari kondisi ini : a) bahwa pemerintahan Desa Nanga Jetak dalam melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa masih memanfaatkan dari pendapatan Asli Desa (PAD) dan iuran swadaya masyarakat yang jumlah dan hasilnya tidak bisa di perikarakan tidak seperti Dana Desa yang sudah pasti anggarannya, b) Dialokasikan Alokasi Dana Desa tidak untuk peruntukannya namun hanya untuk pembayaran upah aparatur dan hanya peningkatan fasilitas Desa saja, dan c) Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan kelembagaan Desa (sosial, adat, ekonomi), d) rendahnya keterlibatan kelembagaan pemerintahan Desa dalam implentasi dan evaluasi Alokasi Dana Desa. Berdasarkan kondisi demikian mengakibatkan upaya peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Nanga Jetak masih sebatas wacana atau masih sebatas cita-cita, karena penggunaan dana ADD yang ada selama ini hanya mencukupi untuk kepentingan operasional pemerintahan Desa berupa pembayaran gaji dan honor kegiatan aparatur Desa.

2. Putra (2013) dalam Jurnal ilmiah ini meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa” Hasil penelitian Dalam jurnal ini adalah bagaimana Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat untuk progam kemajuan otonomi daerah indikasi dari kondisi ini yaitu strategi pemerintah untuk menjadikan Desa yang mandiri dengan cara memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang peruntukannya sudah ditentukan Penggunaan dana Alokasi Dana Desa adalah 30% untuk biaya

operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan Desa. Tujuan penelitian ini merupakan suatu hal yang ingin diketahui tentang berapa banyak sumber Alokasi Dana Desa yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian menyatakan sebagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang peruntukannya untuk pemberdayaan masyarakat hanya digunakan beberapa persen saja namun lebih digunakan kepada biaya operasional pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) maka tidak sesuai dengan peruntukannya, faktor penghambatnya karena kualitas sumber daya manusia yang kurang mengerti akan pemanfaatan Dana Desa dan juga kurangnya pengawasan dari masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu partisipasi masyarakat yang besar.

3. Henariza (2014) dalam skripsi meneliti tentang Praktik Sosial dalam Alokasi Dana Desa untuk Program Pemberdayaan Masyarakat. Didalamnya menjelaskan tentang penerapan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan adanya praktik sosial dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Dengan tujuan menganalisis bentuk praktik sosial dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa, yang mana Alokasi Dana Desa 70% untuk program pemberdayaan dan 30% aparatur pemerintahan Desa. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya praktik sosial itu terjadi dan juga program yang berupa pemberdayaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemerintahan.



## F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pembelanjaan Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dana Desa bersumber dari dana Anggaran Pembelajaan Negara (APBN) dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang berbunyi “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Sumber dana berasal dari APBN yang diserahkan langsung kepada APBD (anggaran Pembelanjaan Daerah), dan diserahkan kepada rekening kepala Desa dan dijadikan sumber utama Anggaran Pendapatan Desa (APBdes).

Alokasi Dana Desa diimplementasikan untuk dimanfaatkan kedalam kedalam bentuk berupa kegiatan atau program-program yang dicanangkan. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah

atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa menurut Setyoko (2011 : 6) yang pertama meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan Desa, yang kedua meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa, yang ketiga meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa, serta yang keempat mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana publik (*public Money*) yang berdasar konsep *value for money* diperlukannya sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang berorientasi sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran Kermendagri Nomor 29 tahun 2002 yang sekarang sudah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini penting terutama untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah (Chabib, 2010 : 36) pengelolaan ini agar memudahkan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program tingkat daerah, maka dari itu fungsi Alokasi Dana Desa diterbitkan untuk pelaksanaan program, dan tentunya akan berdampak untuk sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat tentunya bertujuan untuk menjadikan masyarakat yang mandiri, perlunya implementasi kebijakan untuk pemanfaatan Alokasi Dana Desa Anderson (dalam Winarno, 2007:18) menyebutkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dimaksud, dinilai mempunyai beberapa implikasi yang penerapannya harus sesuai tetunya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan merupakan proses upaya mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat itu sendiri (Najiyati, I nyoman, dan Suryadiputra, 2005 : 85) Dalam hal ini pemanfaatan Alokasi Dana Desa mempunyai peran utama dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Meter dan Horn (dalam Wibawa, 1994 : 45) mengartikan sebagai implementasi kebijakan, meliputi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan.

Tujuan awal pemerintah pusat ingin membangun suatu komitmen atau kerjasama kepada setiap pemerintah daerah yang telah diberi kepercayaan untuk membangun dan memajukan daerah nya masing-masing atau disebut otonomi daerah, dimaksudkan agar lebih mempermudah akses untuk masyarakat yang ingin maju dan berkembang dinegaranya. Aparatur Desa yang dilibatkan secara langsung oleh pemerintah daerah untuk menjadi tangan kanan pemerintah daerah yang juga harus paham dan mengerti betul keadaan masyarakat yang berada dalam batas kekuasaan Desa, maka dibuatkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat Desa itu sendiri, kebijakan itu berupa program. Program yang dibuat berupa kegiatan

pemberdayaan masyarakat karena dengan program pemberdayaan masyarakat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan mereka, menurut wardhani dan haryadi (2004 : 2-3) menambahkan bahwa terdapat 3 (tiga) dimensi pokok pemberdayaan masyarakat, yaitu : yang pertama investasi untuk meningkatkan asset dan kemampuan masyarakat miskin, yang kedua reformasi kelembagaan pemerintahan (dan lokus kekuasaan lain) menuju *good governance* dan akuntabilitas public, yang ketiga merubah tatahubungan, terutama hubungan kekuasaan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa sebagai indikator dari implementasi penyerapan Alokasi Dana Desa menjadi sebuah faktor keberhasilan sebuah kebijakan publik yang dimunculkan oleh pemerintah pusat dan di bantu oleh pemerintahan daerah yang tentunya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. menurut Deddy (2016 : 85) istilah evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, adapun bentuk dan macam evaluasi yang pertama evaluasi kebijakan, yang kedua evaluasi proses yang ketiga evaluasi dampak. Dari ketiga evaluasi tersebut evaluasi kebijakan yaitu upaya untuk menghasilkan rekomendasi dan penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi, sedangkan evaluasi proses merupakan kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kebijakan, evaluasi evaluasi dampak untuk mengetahui dampak dari suatu kebijakan yang telah dibuat.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Cileunyi Wetan, yang beralamatkan di Jl. Raya Cileunyi- rancaekek nomor 445, Telpataufax (022)7836530, kode pos 40622, kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. lokasi ini sangat terbuka sekali dalam proses transparasi Dana Desa jadi memudahkan siapa saja untuk mengetahui pengalokasian Dana Desa
- b. lokasi ini dipandang representatif untuk mengungkap data data yang akan diteliti sebagai pusat dari teknik pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini instrumennya adalah orang atau *Human instrument* (dadang, 2011 : 43) dengan melakuka pendekatan secara fenomenologis artinya peneliti berperan sebagai peneliti dan melihat kejadian yang ada di masyarakat tentunya tidak mengambil keputusan dengan emosional, melainkan mengambil data sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya dimasyarakat.

Metode penelitian dimaksudkan bagi sebuah penelitian yang dilakukan terhadap variabel, dengan tanpa melakukan perbandingan antar variabel. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan memaparkan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini yang ada, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan hal yang terjadi dilapangan dan dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

Oleh karena itu, penulis akan mendeskripsikan berdasarkan data yang telah terkumpul mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat, penekanan utama dalam penelitian ini adalah proses Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa.

### **3. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapat dari pengamatan dan wawancara langsung kepada aparatur Desa Cileunyi wetan dan lembaga-lembaga yang ada di Desa Cileunyi wetan sebagai penerima Alokasi Dana Desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait dan beberapa buku-buku referensi pendukung penelitian.

#### **4. Sumber Data**

Sumber-sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder

##### **a. Sumber Data Primer**

Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari observasi pengamatan dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan atas pengalokasian dana Desa, seperti kepala Desa, bendahara umum Desa, sekretaris Desa, staff pelayanan Desa, dan juga kepada pihak lembaga Desa yang terkait seperti LPMD, PKK, BPD, BUMDES dan kepada tokoh masyarakat di Desa Cileunyi Wetan.

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data tambahan sebagai penguat data primer atau data yang diperoleh dari buku, jurnal, arsip, literatur, artikel dan dari berbagai macam sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk meneliti Pemanfaat Alokasi Dana Desa tersebut.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah hal yang paling penting dan strategis dalam penelitian. Dikarenakan tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan memproses data yang sangat dianggap cocok dan

relevan untuk terlaksananya penelitian ini. Data-data penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai langkah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Apabila digunakan teknik observasi menurut Dadang (2011 : 130) sumber data yang didapat yaitu yang pertama dari benda yang bergerak yaitu orang-orang yang ada instansi terkait, yang kedua yaitu tempat yang berarti dilakukan di tempat yang peneliti teliti, yang ketiga yaitu data yang disajikan seperti tanda-tanda berupa huruf dan angka.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan, merekam dan mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pernyataan yang ingin diketahui peneliti ) dilokasi penelitian . peneliti juga dapat terlibat dalam peran, mulai dari non-partisipan hingga partisipan utuh.

Dalam observasi ini peneliti mengobservasi mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa dari mulai kebijakan pemberdayaan yang dibuat oleh kepala Desa, dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut, adapun peneliti juga meneliti bagaimana proses pemanfaatan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih atau bisa dengan Forum Group Discussion (FGD) untuk saling bertukar informasi



dan ide melalui tanya jawab yang diajukan oleh peneliti , sehingga dapat distrukturkan dalam suatu topik pembahasan yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah menggunakan wawancaratak berstruktur (unstructure Interview) yaitu dimana peneliti tidak menggunakan pedoman khusus atau pedoman wawancara yang awalnya telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiono,2012 : 233). mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa subyek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri dan job description atau wawasan tugs pokok dan fungsi.
- 2) Bahwa apa yang ditanyakan dan dijawab bahkan dikaji oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa tujuan pertanyaan dan jawaban subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudnkan oleh peneliti.

Teknik wawancara ini peneliti mewawancara kepala Desa Cileunyi Wetan, Sekertaris Desa Cileunyi Wetan, bendahara umum Desa, karena bagian tertiggi didalam organisasi adalah Ketua, sekertaris, dan bendahara dengan demikian wewenang informasi yang disampaikan adalah benar adanya, setelah itu staff pelayanan dan kepala bidang lainnya yang diwawancara untuk memperkuat *statement* yang diberikan, juga

ketua lembaga yang ada di Desa seperti BUMDes (Badan Usaha Miliki Desa), LPM (lembaga Pemberdayaan Masyarakat), TP PKK (tim Penggerak pembinaan Kesejahteraan Keluarga), ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan lain-lain.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data dan pengumpulan data untuk mencari dan mengkaji variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah prasasti notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. (Sugiono, 2012 : 219).

### 4. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan yang tentunya untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mengkaji atau membaca buku-buku, jurnal ilmiah dan berbagai sumber ;ainnya yang bisa dijadikan acuan atau bahan pengumpulan data yang diteliti juga skripsi dan tesis sebagai acuan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya agar tidak terjadi plagiasi dan kesamaan data yang diteliti dan juga dengan cara *browsing* melalui internet untuk mencari artikel-artikel dan e-jurnal atau jurnal elektronik yang dapat membantu penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, dilakukan dengan cara menggabungkan jawaban-jawaban dan pendapat. Untuk data yang bersifat kualitatif akan dianalisis dengan cara sebagai berikut :

### a. Reduksi Data

Proses ini dimaksudkan untuk mengefisienkan waktu, biaya, proses pencarian data lain sebagainya dalam penelitian. Dimaksudkan penelitian ini tidak keluar atau melenceng dari tujuan awal, maka harus terlebih dahulu data apa yang kita butuhkan. Mulai dari data yang sifatnya umum dikelompokkan kemudian dikategorikan dan diklasifikasikan supaya lebih mudah dalam proses penelitian. Dalam hal ini data yang diperlukan yakni tentang pemanfaatan Alokasi Dana Desa pada kantor Desa Cileunyi Wetan.

### b. Klarifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dengan topik pembahasan penelitian, yaitu tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam pembedayaan masyarakat yaitu membahas studi tentang bagaimana kantor Desa Cileunyi wetan dalam memanfaatkan Dana Desa yang di alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat Desa Cileuni wetan.

### c. Verifikasi Data

Langkah ini dilakukan untuk uji data yang didapat tentang Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dengan menggunakan teori-teori yang sudah dibahas dalam kerangka pemikiran awal langkah ini agar adanya

keselarasan antara teori yang sudah dipaparkan dan didapatkan dengan realita yang ada.

d. Menarik Kesimpulan

Sebagai salah satu langkah yang terakhir dari penelitian ini, dan dari data yang sudah terkumpul, akan ditarik suatu kesimpulan tentang bagaimana pemanfaat Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat yang ada di kantor Desa Cileuyi Wetan.

